



Peluang Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Dunia Hukum Perdata Nasional

Nurul Hafiza¹

¹ Universitas Sebelas Maret, nurulhafiza789@gmail.com

Abstrak

Revolusi digital beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap hukum perdata nasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang dan tantangan baru dalam praktik hukum. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya ChatGPT (*Generative Pre-trained Transformer*), telah menjadi inovasi yang menjanjikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT dalam hukum perdata nasional membawa peluang signifikan. Ini dapat mengubah cara hukum perdata diterapkan, dipahami, dan diakses. ChatGPT dapat meningkatkan aksesibilitas hukum, efisiensi praktik hukum, pemahaman kasus hukum yang kompleks, konsistensi penerapan hukum, dan bahkan inovasi dalam bantuan hukum. Namun, penggunaan ChatGPT juga menimbulkan tantangan, seperti masalah etika, perlindungan data, dan regulasi yang tepat.

Kata kunci: ChatGPT, Hukum Perdata Nasional, Teknologi

Abstract

The digital revolution in recent decades has transformed the landscape of national civil law. Advances in information and communication technology (ICT) have presented new opportunities and challenges in legal practice. The use of artificial intelligence (AI), particularly ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), has emerged as a promising innovation. The research methodology employed is a descriptive-analytical approach using secondary data.

The research findings indicate that the use of ChatGPT in national civil law offers significant opportunities. It can change how civil law is applied, understood, and accessed. ChatGPT can enhance legal accessibility, improve legal practice efficiency, facilitate better understanding of complex legal cases, maintain consistency in legal application, and even introduce innovations in legal assistance. However, the use of ChatGPT also raises challenges, such as ethical concerns, data protection, and appropriate regulations

Keywords: ChatGPT, National Civil Law, Technology.

I. Pendahuluan

Revolusi digital yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah memicu perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hukum perdata nasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam praktik hukum. Dengan perubahan ini, penggunaan teknologi AI, khususnya ChatGPT (*Generative Pre-trained Transformer*), telah muncul sebagai salah satu inovasi paling menjanjikan (W & Pribadi, 2023). ChatGPT adalah contoh terkini dari perkembangan dalam kecerdasan buatan yang mampu memahami dan menghasilkan teks berdasarkan konteks dan permintaan pengguna. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ChatGPT mampu memberikan respons yang sangat mirip dengan teks manusia dalam berbagai bahasa, yang menjadikannya alat yang potensial untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di dalam dunia hukum perdata nasional (Fadiyah Ghazmi, 2021).

Dunia hukum perdata nasional merupakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan kontraktual, kepemilikan properti, tanggung jawab perdata, warisan, dan banyak lagi (Setiawan & Luthfiyani, 2023). Dalam konteks ini, peran teks hukum sangat penting, karena hukum perdata seringkali bergantung pada interpretasi dan aplikasi yang tepat dari teks-teks ini. Perkembangan terkini dalam kecerdasan buatan telah menghadirkan teknologi ChatGPT, yang mampu memproses dan memahami bahasa manusia secara alami. Ini membuka peluang baru dalam praktik hukum perdata nasional yang bisa membawa perubahan besar dalam bagaimana hukum diterapkan dan dipahami (Wahid & Hikamudin, 2023).

Penggunaan ChatGPT dalam dunia hukum perdata nasional tidak hanya relevan tetapi juga penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum modern (Lucchi, 2023). Artikel ini bertujuan untuk menggali potensi penggunaan teknologi ChatGPT dalam praktik hukum perdata nasional dengan lebih mendalam (Priowirjanto et al., 2023). Kami akan mengidentifikasi dan membahas aplikasi konkret ChatGPT dalam berbagai aspek praktik hukum perdata, mengkaji tantangan teknis dan etis yang mungkin timbul, serta menganalisis manfaat yang dapat diperoleh dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pemahaman hukum perdata. Selain itu, kami akan mengevaluasi dampaknya pada pelayanan hukum, sistem peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan. Artikel ini juga akan mengupas implikasi hukum yang mungkin muncul dari penggunaan ChatGPT dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, penggunaan teknologi ChatGPT dalam dunia hukum perdata nasional adalah sebuah tren yang pantas diikuti dengan cermat dan dianalisis secara mendalam untuk memahami potensi positifnya serta menghadapi potensi risikonya.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis dengan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari

lapangan, melainkan diperoleh melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan (Sugiyono,2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder, seperti teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka yang relevan. Dalam analisis data, penelitian ini akan menerapkan pendekatan deskriptif untuk menguraikan dan menjelaskan konsep-konsep hukum perdata yang relevan, serta pendekatan analitis untuk menganalisis implikasi penggunaan teknologi ChatGPT dalam konteks hukum perdata nasional. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan akan digunakan sebagai landasan teoretis untuk menjelaskan dan mengevaluasi dampak serta potensi teknologi ChatGPT dalam dunia hukum perdata.

III. Pembahasan

Hukum perdata, juga dikenal sebagai hukum sipil, adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam masyarakat. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu, serta prosedur hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat (Dwipayana & Pratama, 2020). Interaksi dengan ChatGPT seringkali melibatkan perjanjian atau kontrak elektronik. Hukum perdata berperan dalam menentukan keabsahan dan penegakan kontrak elektronik ini.

Penggunaan teknologi ChatGPT (*Generative Pre-trained Transformer*) dalam dunia hukum perdata nasional membuka berbagai peluang yang signifikan dan potensial untuk mengubah paradigma dalam sistem hukum. Pertama, teknologi ChatGPT dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan aksesibilitas hukum (Dotulong, 2014). Dengan kemampuannya untuk memberikan jawaban cepat dan akurat terhadap pertanyaan hukum yang diajukan oleh masyarakat, ChatGPT dapat menjadi sumber informasi hukum yang mudah diakses oleh individu tanpa perlu menjadi pakar hukum (Helberger & Diakopoulos, 2023). Ini membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum dan memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum perdata nasional.

Selanjutnya, ChatGPT juga memiliki potensi untuk mengoptimalkan efisiensi dalam praktik hukum perdata. Dengan kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam praktik hukum, seperti analisis kontrak atau penyusunan perjanjian, teknologi ini dapat menghemat waktu dan sumber daya praktisi hukum. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan strategis, seperti penelitian hukum yang mendalam atau konsultasi hukum yang lebih personal. Efisiensi yang ditingkatkan ini tidak hanya dapat menguntungkan praktisi hukum, tetapi juga dapat berdampak positif pada biaya hukum yang lebih terjangkau bagi klien.

Penggunaan ChatGPT juga relevan dalam pemahaman terhadap kasus hukum yang kompleks. Dalam situasi di mana hukum perdata dapat menjadi sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang rumit, ChatGPT dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis dan merinci argumen hukum yang terlibat (Mangara & Al-Djufri, 2022).

Dengan kemampuannya untuk memproses dan merangkum teks hukum yang luas, teknologi ini dapat membantu praktisi hukum dalam menghadapi tantangan analisis yang rumit. Ini dapat meningkatkan kualitas representasi hukum dalam peradilan dan berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih baik dan adil.

Selain itu, penggunaan ChatGPT dapat berkontribusi pada penerapan hukum yang lebih konsisten. Karena ChatGPT dapat menghasilkan jawaban yang konsisten berdasarkan teks hukum yang sama, teknologi ini dapat membantu dalam menjaga keseragaman interpretasi dan penerapan hukum perdata nasional. Hal ini memiliki potensi untuk menghindari adanya interpretasi yang bervariasi atau bahkan bertentangan dalam penerapan hukum, yang seringkali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tidak hanya itu, ChatGPT juga dapat digunakan dalam inovasi dalam penyediaan bantuan hukum. Dalam mengembangkan chatbot hukum atau sistem berbasis AI lainnya, ChatGPT dapat memberikan nasihat hukum dasar kepada individu yang membutuhkan bantuan hukum, terutama mereka yang mungkin tidak mampu mengakses layanan hukum tradisional. Ini dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan akses keadilan dan memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan.

Meskipun peluang penggunaan ChatGPT dalam dunia hukum perdata nasional sangat menarik, ada sejumlah tantangan yang juga perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah etika terkait dengan penggunaan teknologi ini dalam pengambilan keputusan hukum, serta perlindungan data yang perlu diperhatikan dengan seksama. Selain itu, perlunya regulasi yang tepat untuk mengatur penggunaan ChatGPT dalam konteks hukum perdata nasional juga harus dipertimbangkan dengan serius.

Dalam keseluruhan, penggunaan teknologi ChatGPT memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam dunia hukum perdata nasional dengan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan pemahaman hukum. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan mempertimbangkan semua aspek etika, privasi, dan hukum yang relevan.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penggunaan teknologi ChatGPT dalam dunia hukum perdata nasional menawarkan berbagai peluang signifikan yang dapat mengubah cara hukum perdata diterapkan, dipahami, dan diakses. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas hukum, meningkatkan efisiensi dalam praktik hukum, memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap kasus hukum yang kompleks, menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, dan bahkan menghadirkan inovasi dalam bantuan hukum. Namun, penggunaan ChatGPT juga memunculkan sejumlah tantangan, termasuk masalah etika, perlindungan data, dan regulasi yang tepat.

Saran

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali potensi penggunaan teknologi ChatGPT dalam berbagai aspek praktik hukum perdata nasional. Penelitian ini dapat meliputi studi tentang efek teknologi ini terhadap efisiensi, kualitas pengambilan keputusan hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

V. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah bisa menyelesaikan artikel hingga selesai. Dan penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
2. Pihak-pihak yang turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Wahid, R., & Hikamudin, E. (2023). Analisis Penggunaan Chat-GPT Oleh Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pedagogik Indonesia*, 1(2), 112–117. <https://journal.ksatriacendekiaindonesia.id/index.php/jpi/article/view/29>
- Dwipayana, D. P., & Pratama, D. Y. (2020). Proceeding of Conference on Law and Social Studies Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga.
- Setiawan, A., & Luthfiyani, U. K. (2023). Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis. *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v4i1.3680>
- Fadiah Ghazmi, S. (2021). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 782–303. <https://jhlhg.rewangrencang.com/>
- W, A. D. A., & Pribadi, M. R. (2023). *Pengoptimalan Penggunaan dan Fungsi ChatGPT Pada Anak Muda Gereja St . Petrus Palembang*. 1(3), 1–5.
- Dotulong, T. (2014). Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Lex Privatum*, II(3), 147–156.
- Romli, M. (2021). Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam | |*, 6(2), 212–215.
- Ginting, B. (2023). Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 1–6.
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 269–290. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v3i4.248>
- Helberger, N., & Diakopoulos, N. (2023). ChatGPT and the AI Act. *Internet Policy Review*, 12(1), 1–6. <https://doi.org/10.14763/2023.1.1682>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2023). Tantangan Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandang Moral. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 456–463. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4779>
- Putra, R. K. T., Saputro, F. R., Hakim, L., Ramadhan, Y., & Fuadin, A. (2023). Fenomena ChatGPT Peningkatkan civic skill digital native generation. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 140–147. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/index>
- Priowirjanto, E. S., Rivani Israwan, A. R., Josca, M. P., Kevin, N., Ardhiansyah, C., Desiani, R. H., & Munaf, C. R. (2023).

Sosialisasi Mengenai Aspek Hukum Dari Penggunaan Chatgpt
Dalam Dunia Pendidikan Di Smk Al-Wafa Kabupaten Bandung.
Kabuyutan, 2(2), 92–99.
<https://doi.org/10.61296/kabuyutan.v2i2.161>

Paul Riermaier, *ChatGPT and Other AI Technologies in the Study and Practice of Law*, <https://www.law.upenn.edu/live/news/15538-chatgpt-and-the-law> diakses pada tanggal 3 Oktober 2023

Stephanie Wilkins, *ChatGPT Is Impressive, But Can (and Should) It Be Used in Legal?*, <https://www.law.com/legaltechnews/2022/12/15/chatgpt-is-impressive-but-can-and-should-it-be-used-in-legal/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2023

Stephen Coulthart, Sam Keller, Michael D. Young, *What ChatGPT Can and Can't Do for Intelligence*, <https://www.lawfaremedia.org/article/what-chatgpt-can-and-can-t-do-for-intelligence> diakses pada tanggal 3 Oktober 2023